



PEMERINTAH KABUPATEN
BATU BARA

LAPORAN KINERJA

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. BATU BARA**

TAHUN 2024



bkad.batubarakab.go.id



[bkad batubara](#)



[bkad_batubara](#)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Kineja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	WTP	n/a	n/a	215.591.554.319	215.015.290.459	99,73
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72,00 (BB)	72,81 (BB)	101,13%	12.193.393.611	11.810.886.960	96,86
Total Belanja						227.784.947.930	226.826.177.419	99,58

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja diatas, hanya sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah saja yang saat ini realisasi kinerjanya dapat diperoleh yakni dengan nilai 72,81 dengan predikat BB dari target 72,00 yang ditetapkan. Sedangkan sasaran tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP belum dapat diperoleh realisasinya dikarenakan sampai dengan saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sedang disusun.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan (BKAD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja yang disusun secara periodik

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja tahun berikutnya. Harapannya, Laporan ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Air Putih, Januari 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

**RIJALI, S.Pd., M.M.
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19790604 200604 1 016

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
1.5. Isu Strategis	4
1.6. Keadaan Pegawai	5
1.7. Sarana Dan Prasarana	6
1.8. Keuangan.....	8
1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah	11
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	15
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024	17
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	19
3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	21
3.5. Realisasi Anggaran	22
3.6. Penghargaan	31
BAB IV PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Rencana Tindak Lanjut	34

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024	12
Tabel 2.2	Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2024 ..	13
Tabel 2.3	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis.....	13
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2024	14
Tabel 3.1	Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra).....	20
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Anggaran.....	22
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024	26
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024...	30
Tabel 3.6	Penghargaan atas capaian kinerja BKAD yang diberikan Tahun 2024	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Kinerja.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1) Peningkatan akuntabilitas BKAD Kabupaten Batu Bara;
- 2) Umpan balik bagi peningkatan kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara;
- 3) Meningkatkan Kredibilitas BKAD Kabupaten Batu Bara terhadap pemberi amanah/ delegasi wewenang;
- 4) Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

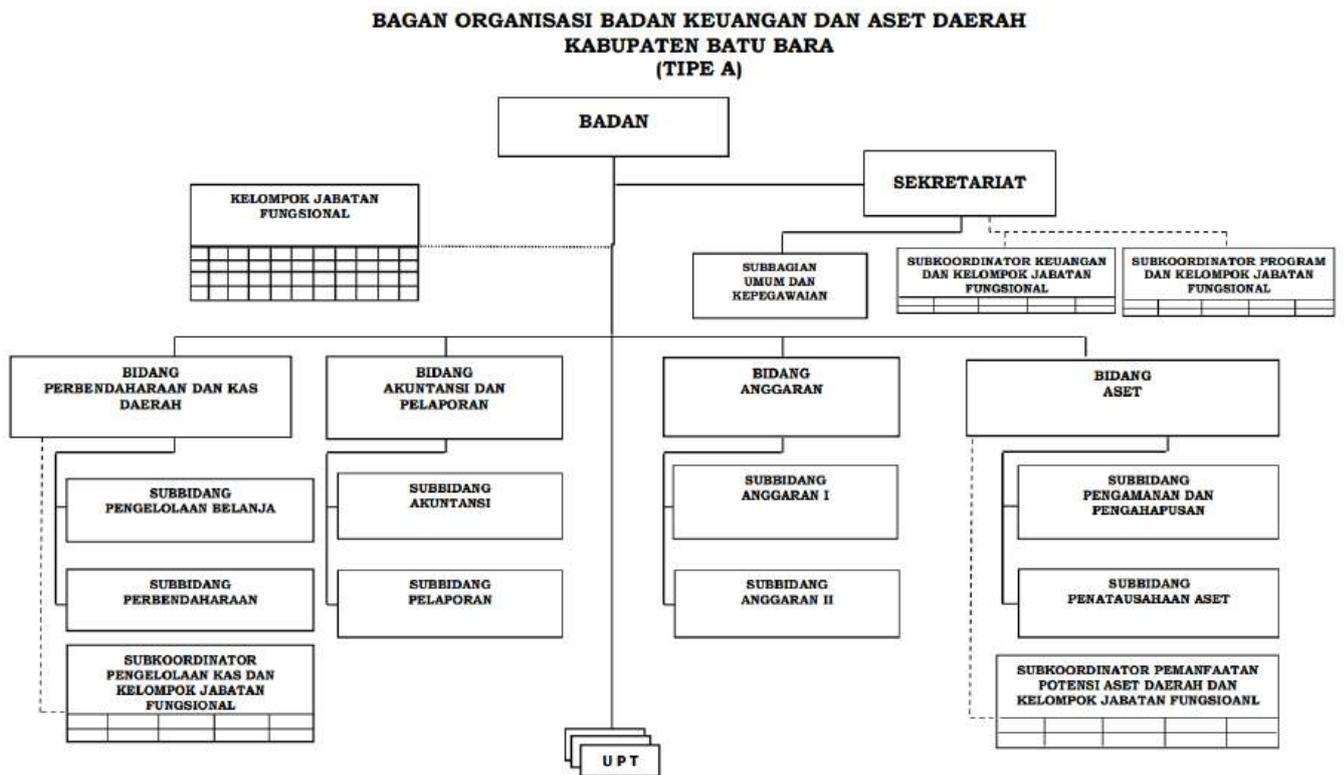
1.3. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menjabarkan melalui peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan keuangan dan Aset daerah secara umum maka BKAD Kabupaten Batu Bara perlu di tunjang dengan jabatan struktural dan fungsional yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga beban kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh Pejabat Struktural dan fungsional yang mengembannya. BKAD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala Sub Bidang serta 4 (empat) Ketua Tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Ketua Tim Substansi Keuangan, dan
 - c. Ketua Tim Substansi Program
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran I, dan
 - b. Sub Bidang Anggaran II
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan, dan

- c. Ketua Tim Substansi Pengelolaan Kas
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi, dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan
- 6. Bidang Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset, dan
 - c. Ketua Tim Substansi Pemanfaatan Potensi Aset Daerah

Adapun Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, serta Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah sela kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.

1.5. Isu Strategis

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan

Pemerintah daerah dalam mencapai *Good dan Clean Governance*. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Mempertahankan Opini atas Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
4. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
5. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang

1.6. Keadaan Pegawai

Aparatur Sumber Daya Manusia BKAD Kabupaten Batu Bara sampai dengan Bulan Desember 2024 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.1. dan berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.3. berikut ini :

Tabel 1.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1	0	1
2	Eselon III A	1	0	1
3	Eselon III B	3	1	4
4	Eselon IV A	5	4	9
5	Pelaksana	9	14	23
6	Subkoordinator / Ketua Tim	3	1	4
7	Fungsional	0	0	0
JUMLAH TOTAL		22	20	42

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	15	11	26
3	Golongan II	4	8	12
JUMLAH TOTAL		22	20	42

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Magister (S2)	4	5	9
3	Sarjana (S1)	13	7	20
4	Diploma III	5	4	9
5	SLTA	0	4	4
JUMLAH TOTAL		22	20	42

1.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Batu Bara yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	A.C. Split	8
2	A.C. Window	22
3	Acces Point	18
4	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	5
5	Alat Pemadam/Portable	2
6	Alat Penghancur Kertas	1
7	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1
8	Alat Tennis Meja	1
9	Alat Ukur Lainnya Lain-Lain	1
10	Alat Ukur Universal Lain-lain	1
11	Bracket Standing Peralatan	1
12	Brandkas	4

13	Camera Digital	3
14	CCTV - Camera Control Television System	8
15	Dinonaktifkan	25
16	Dispenser	8
17	Exhaust Fan	6
18	External	8
19	External/ Portable Hardisk	3
20	Filing Cabinet Besi	7
21	Gordyin/Kray	10
22	Handy Talky (HT)	1
23	Kipas Angin	2
24	Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain	3
25	Kontainer	75
26	Kursi Besi/Metal	90
27	Kursi Biasa	2
28	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	11
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9
31	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	11
32	Kursi Putar	35
33	Kursi Rapat	50
34	Kursi Tamu	3
35	Lap Top	41
36	Layar Film/Projector	3
37	LCD Projector/Infocus	1
38	Lemari	4
39	Lemari Besi/Metal	6
40	Lemari Es	2
41	Lemari Kayu	7
42	Loudspeaker	1
43	Meja 1/2 Biro	31
44	Meja Bundar	1
45	Meja Kerja Kayu	3
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
50	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
51	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	20
52	Meja Resepsionis	1
53	Mesin Absen (Time Recorder)	1
54	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	1
55	Mesin Bor Tangan	1
56	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1
57	Microphone	1
58	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1

59	Monitor	6
60	Netware Interface External	15
61	P.C Unit	61
62	Papan Nama Instansi	1
63	Papan Pengumuman	167
64	Papan Visual/Papan Nama	1
65	Partisi	19
66	Penangkal Petir	2
67	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
68	Pick Up	1
69	Pompa Air	2
70	Portable Generating Set	1
71	Portable Reporter Link	1
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58
73	Rak Besi	3
74	Rak Kayu	1
75	Rak Server	1
76	Rak-Rak Penyimpan	1
77	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
78	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6
79	Self Supporting Tower	1
80	Server	3
81	Sofa	3
82	Sound System	2
83	Stabilisator	1
84	Telephone Mobile	8
85	Televisi	3
86	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5
87	Unit Power Supply	1
88	Video Conference	1
89	Web Cam	4
Grand Total		985

1.8. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKAD pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Alokasi anggaran murni BKAD untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.225.433.239.212,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.227.784.947.930,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab V – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2024 - 2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam rencana kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang terkolerasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
- b. Konsisten dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan
- d. Pemetaan secara cermat potensi risiko yang akan terjadi Ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. BKAD Kabupaten Batu Bara telah Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta diperbaharui pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menyesuaikan dengan adanya Perubahan APBD Tahun 2024 BKAD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perubahan Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disajikan pada Table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Sesuai SAP	Opini BPK	Nilai	WTP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,00(BB)

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025 yaitu : **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Batu Bara melaksanakan tugas sesuai rancangan yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun Target belanja BKAD Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	16.937.418.897	7,44 %
Belanja Modal	775.268.618	0,34 %
Belanja Tidak Terduga	200.000.000	0,09 %
Belanja Transfer	209.872.260.415	92,14 %
Jumlah	227.784.947.930	100 %

Sedangkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Presentase
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	215.591.554.319	94,65 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	12.193.393.611	5,35%
JUMLAH		227.784.947.930	100 %

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara beberapa program dan kegiatan, program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel di atas, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada Tahun Anggaran 2024 menampung dan melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.
2. Penurunan kinerja serta alternatif analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target serta realisasi pada indikator sasaran dengan rincian sebanyak 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	N/A

Dari tabel diatas, Untuk mencapai tujuan tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), indikator kinerja utama yang digunakan adalah opini

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Target yang ditetapkan adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, data mengenai realisasi dan capaian dalam bentuk persentase belum tersedia (N/A), karena proses audit oleh BPK masih berlangsung.

Opini WTP adalah standar tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh standar nasional. Sebagai perbandingan, standar nasional menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, capaian opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi standar nasional tersebut.

Keberhasilan capaian atas sasaran dan indikator kinerja diatas ditunjang oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta bidang Akuntansi dan Pelaporan. Selain itu ditunjang pula oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di laksanakan oleh bidang Aset BKAD Kabupaten Batu Bara.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (72,00)	BB (72,81)	101,13%

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Target yang ditetapkan adalah nilai BB dengan skor 72,00. Hasil realisasi menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah BB dengan skor 72,81, yang berarti mencapai 101,13% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja diatas didukung oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat yang mampu memotivasi dan mengarahkan tim untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Staf yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan kinerja,

mampu mengelola tugas dengan baik dan tepat waktu. Koordinasi yang baik antara berbagai perangkat daerah dan instansi terkait juga menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian atas sasaran dan indikator kinerja diatas ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh bidang Sekretariat BKAD Kabupaten Batu Bara.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, BKAD Kabupaten Batu Bara telah berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Dengan tujuan utama menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Perkembangan capaian kinerja ini menggambarkan komitmen dan dedikasi BKAD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hingga tahun 2024, capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan kerja keras dan koordinasi yang efektif antara berbagai perangkat daerah.

Perkembangan capaian kinerja BKAD Tahun 2024 dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1
Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WDP	66,67	WTP	N/A	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	B	B	100	B	B	100	B	B	100	70,05 BB	70,14 BB	100,13	BB (72,00)	BB (72,81)	101,13%

Dari tabel diatas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indikator dengan uraian sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP

Pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah daerah berhasil mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian 100%. Namun, pada tahun 2023, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menunjukkan penurunan capaian menjadi 66,67%. Hingga saat ini, data realisasi dan capaian untuk tahun 2024 belum tersedia (N/A) karena proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara masih berlangsung.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Dari tahun 2020 hingga 2022, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100% setiap tahunnya pada level B. Pada tahun 2023, target nilai AKIP meningkat ke level BB dengan skor 70,14, dan hasil realisasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 100,13%.

Pada tahun 2024, target nilai AKIP tetap pada level BB dengan skor 72,00. Realisasi menunjukkan peningkatan capaian menjadi 101,13% dengan skor 72,81. Hal ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun capaian kinerja berdasarkan target rencana strategis (renstra) dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			2025			2026		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	N/A	WTP	-	-	WTP	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (72,00)	BB (72,81)	101,13%	BB (73,50)	-	-	BB (75,00)	-	-

Sebagai bagian dari rencana strategis, BKAD menetapkan berbagai target kinerja untuk mencapai akuntabilitas keuangan dan kinerja yang optimal. Dua indikator kinerja yang menjadi fokus adalah opini BPK-RI dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah memperoleh opini WTP. Hingga saat ini, data realisasi dan capaian belum tersedia karena proses audit oleh BPK masih berlangsung. Target akhir tahun rencana strategis untuk tahun 2026 tetap konsisten dengan opini WTP sebagai standar pencapaian yang diharapkan. Perbandingan capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih berada pada jalur yang tepat dalam usaha mencapai opini WTP setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, target nilai AKIP adalah BB dengan skor 72,00, dan realisasi menunjukkan peningkatan capaian menjadi 101,13% dengan skor 72,81. Untuk tahun 2025, target nilai AKIP meningkat menjadi BB dengan skor 73,50, dan pada tahun 2026, target lebih lanjut meningkat menjadi BB dengan skor 75,00. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan tren positif dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah, yang diharapkan dapat berlanjut hingga akhir tahun rencana strategis pada 2026.

BKAD melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja rutin dilakukan setiap triwulan.

3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama OPD.

Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Sementara pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah.

Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara mempertimbangan objektifitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam mengukur capaian indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 didasarkan pada:

1. Angka maksimum capaian indikator sasaran ditetapkan 100% penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator sasaran adalah:

- *Opini BPK = Nilai Opini BPK*
- *Nilai AKIP = Nilai Evaluasi AKIP OPD dari Inspektorat*

3.5. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja BKAD Kab Batu Bara dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut diatas, maka untuk target dan realisasi anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.193.393.611	11.810.886.960	96,86
1.1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.252.280	137.083.470	85,54
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.551.240	48.435.000	87,19
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.950.000	23.182.000	86,02
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.750.000	23.590.000	91,61
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.001.040	41.876.470	80,53
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.154.462.378	6.088.356.107	98,93
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.009.462.378	5.946.511.357	98,95
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000	43.981.000	97,74
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000.000	73.888.750	98,52
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	23.975.000	95,90
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	731.707.836	709.900.000	97,02
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	177.000.000	177.000.000	100,00

1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	554.707.836	532.900.000	96,07
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.558.751.459	1.446.930.447	92,83
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.508.539	12.394.000	85,43
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	337.254.719	329.479.000	97,69
1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.897.446	47.287.000	81,67
1.4.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.419.915	152.746.500	73,29
1.4.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.920.840	55.775.000	88,64
1.4.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	40.200.000	74,44
1.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	823.750.000	809.048.947	98,22
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.669.542.618	1.631.378.000	97,71
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.136.950.000	1.136.950.000	100
1.5.2.	Pengadaan Mebel	276.040.000	241.470.000	87,48
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.552.618	252.958.000	98,60
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.604.880.040	1.531.647.586	95,44
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	4.000.000	40,00
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	390.000.040	327.995.242	84,10
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.204.880.000	1.199.652.344	99,57
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.797.000	265.591.350	84,64
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.800.000	48.894.000	98,18
1.7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.800.000	14.387.350	85,64
1.7.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.197.000	57.455.000	85,50
1.7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000	144.855.000	80,48
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	214.003.774.319	213.506.398.626	99,77
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.435.620.000	1.263.602.420	88,02
2.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	80.300.000	61.356.000	76,41
2.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80.430.000	70.770.120	87,99
2.1.3.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	94.030.000	72.271.789	76,86
2.1.4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	94.030.000	91.407.373	97,21

2.1.5.	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	131.210.000	123.171.000	93,87
2.1.6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	154.910.000	133.611.181	86,25
2.1.7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	312.730.000	259.099.000	82,85
2.1.8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	304.480.000	272.463.209	89,48
2.1.9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	53.500.000	52.148.000	97,47
2.1.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	105.000.000	102.792.748	97,90
2.1.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	25.000.000	24.512.000	98,05
2.1.12.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	0,00
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.242.087.000	1.225.150.560	98,64
2.2.1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	80.000.000	78.790.954	98,49
2.2.2.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	118.040.000	117.978.071	99,95
2.2.3.	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	157.500.000	156.748.996	99,52
2.2.4.	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	240.597.000	239.186.000	99,41
2.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	74.800.000	74.197.730	99,19
2.2.6.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	50.000.000	49.780.705	99,56
2.2.7.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	68.130.000	66.965.550	98,29
2.2.8.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	273.370.000	270.863.454	99,08

2.2.9.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	179.650.000	170.639.100	94,98
2.3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.135.806.904	1.027.999.694	90,51
2.3.1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	121.000.000	120.048.000	99,21
2.3.2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	146.413.800	123.173.116	84,13
2.3.3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	255.831.600	255.443.808	99,85
2.3.4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	120.000.000	118.367.000	98,64
2.3.5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	168.800.000	164.107.547	97,22
2.3.6.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	177.012.000	145.738.333	82,33
2.3.7.	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	77.087.360	46.266.900	60,02
2.3.8.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	69.662.144	54.854.990	78,74
2.4.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	210.190.260.415	209.989.645.952	99,90
2.4.1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	98.000.000	97.541.537	99,53
2.4.2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	201.444.602.800	201.444.446.800	100
2.4.3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	200.000.000	-	0,00
2.4.4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.447.657.615	8.447.657.615	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.587.780.000	1.508.891.833	95,03
3.1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.587.780.000	1.508.891.833	95,03
3.1.1.	Penyusunan Standar Harga	41.080.000	40.000.706	97,37
3.1.2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	547.600.000	529.086.533	96,62
3.1.3.	Pengamanan Barang Milik Daerah	468.950.000	441.622.540	94,17
3.1.4.	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan	300.357.500	272.949.563	90,87

	Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
3.1.5.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4.945.000	600.000	12,13
3.1.6.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	224.847.500	224.632.491	99,90
JUMLAH		227.784.947.930	226.826.177.419	99,58

Selanjutnya, perbandingan dengan realisasi tahun lalu ditampilkan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Tahun Anggaran	
	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.092.621.030	11.810.886.960
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.155.000	137.083.470
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.761.000	48.435.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	23.182.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	23.590.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.394.000	41.876.470
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.629.986.158	6.088.356.107
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.494.686.158	5.946.511.357
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61.878.000	43.981.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.422.000	73.888.750
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	23.975.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.398.000	709.900.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	177.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	184.398.000	532.900.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.306.997.876	1.446.930.447
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.065.300	12.394.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	467.878.100	329.479.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	47.287.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.446.000	152.746.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.314.000	55.775.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	40.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	651.294.476	809.048.947
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.244.115.000	1.631.378.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.765.600.000	1.136.950.000
Pengadaan Mebel	-	241.470.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	252.958.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.133.298	1.531.647.586
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000	4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	375.174.850	327.995.242
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.518.058.448	1.199.652.344
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.835.698	265.591.350
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.345.012	48.894.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	14.387.350
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.285.000	57.455.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	144.855.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	210.407.060.884	213.506.398.626
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.588.826.612	1.263.602.420
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	251.212.569	61.356.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.034.293	70.770.120
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	170.308.991	72.271.789
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	91.407.373
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	230.733.000	123.171.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	133.611.181
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	369.952.724	259.099.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	406.585.035	272.463.209
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	52.148.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	102.792.748
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	24.512.000
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.274.059.560	1.225.150.560
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	103.457.000	78.790.954
Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	143.912.000	117.978.071
Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	157.280.000	156.748.996
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	371.847.900	239.186.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	105.080.171	74.197.730
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48.493.000	49.780.705

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	65.919.439	66.965.550
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	175.619.319	270.863.454
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102.450.731	170.639.100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.016.897.970	1.027.999.694
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	175.133.200	120.048.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	140.651.000	123.173.116
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	86.566.000	255.443.808
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	145.279.100	118.367.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	173.541.000	164.107.547
Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	145.729.000	145.738.333
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	46.266.900
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	149.998.670	54.854.990
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	206.527.276.742	209.989.645.952
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	257.984.542	97.541.537
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	199.559.292.200	201.444.446.800
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	998.500.000	-
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.711.500.000	8.447.657.615
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.367.731.910	1.508.891.833
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.367.731.910	1.508.891.833
Penyusunan Standar Harga	40.857.000	40.000.706
Penatausahaan Barang Milik Daerah	436.097.545	529.086.533
Inventarisasi Barang Milik Daerah	126.240.375	-
Pengamanan Barang Milik Daerah	388.776.046	441.622.540
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	174.525.972	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	174.076.472	272.949.563
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	300.000	600.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.858.500	224.632.491
JUMLAH TOTAL	227.784.947.930	226.826.177.419

Adapun realisasi beberapa subkegiatan tidak terserap maksimal antara lain:

- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Persentase Realisasi dari Subkegiatan di atas berada dibawah 80%.

Tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi pengeluaran belanja terkait dengan kas keuangan daerah.

Adapun anggaran dan realisasi belanja per sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 3.5
 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	WTP	N/A	N/A	215.591.554.319	215.015.290.459	99,73%	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72,00 (BB)	72,81 (BB)	101,12%	12.193.393.611	11.810.886.960	96,86%	1,00
Total Belanja						227.784.947.930	226.826.177.419	99,58	

Realisasi anggaran pada sasaran kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai SAP dengan indikator Opini BPK yaitu sebesar 99,73%. Sementara itu, realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai AKIP sebesar 96,86%.

Analisis Akuntabilitas kinerja BKAD Kab Batu Bara tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan. Namun kinerja BKAD belum dapat diukur secara keseluruhan dikarenakan masih dalam proses audit oleh BPK.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran BKAD cukup tinggi sebesar 99,58%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat serapan anggaran Tahun 2024 terserap maksimal.

Efisiensi kinerja diukur dari perbandingan antara hasil kinerja yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, nilai efisiensi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah adalah 1,00, yang menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Nilai efisiensi ini menunjukkan bahwa setiap unit sumber daya yang digunakan berhasil memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja.

3.6. Penghargaan

Pada Tahun 2024 BKAD Kabupaten Batu Bara menerima sebanyak 1 (satu) penghargaan atas capaian kinerja di bidang aset. Adapun penghargaan tersebut disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Penghargaan atas capaian kinerja BKAD yang diberikan Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Prestasi dalam Bidang	Lembaga/ Instansi yang Memberikan	Waktu (Tgl/Bln/Thn)
1.	OPD yang Tepat Dalam Penyetoran Pajak dan Menginput NTPN di Aplikasi SIPD RI	Perbendaharaan	Bupati Batu Bara	9 Agustus 2024
2.	Penyaluran Dana Desa 100% Tahap I Tahun 2004 Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester I TA 2024	Keuangan	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	13 Agustus 2024



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah Kabupaten agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA BKAD Kabupaten Batu Bara tahun 2024 – 2026, Laporan Tahunan 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga disadari pembuatan Laporan Tahunan ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 belum dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh. Sampai dengan saat ini, capaian kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 pada sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,58%. Sedangkan sasaran tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah dan tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah belum dapat diukur kinerjanya dikarenakan sampai dengan saat ini proses audit oleh BPK masih berlangsung, dan pejabat penatausahaan barang serta pengurus barang pada masing-masing OPD di Kabupaten Batu Bara masih melakukan rekonsiliasi data-data aset dengan pengelola barang Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/ kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.







**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIJALI, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19790604 200604 1 016

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
SEKRETARIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Huruf	BB (72,00)
2	Tercapainya cakupan program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.193.393.611	PAPBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	210.190.260.415	PAPBD
	JUMLAH	222.383.654.026	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



RIJALI S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19790604 200604 1 016

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BINTI CHOIRUL MUAMANAH, SE., M.Si**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


BINTI CHOIRUL MUAMANAH, SE., M.Si
Penata
NIP. 19790710 201001 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100
	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2
	Tercapainya penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	156
2	Tercapainya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100
	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
3	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100
	Tersedianya unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	14
	Tersedianya Mebel yang dibutuhkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10
	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	9
4	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
5	Tercapainya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Paket	3
	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Paket	3
	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	8
	Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Paket	3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	731.707.836	PAPBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	177.000.000	PAPBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	554.707.836	PAPBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.558.751.459	PAPBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.508.539	PAPBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	337.254.719	PAPBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.897.446	PAPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.419.915	PAPBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.920.840	PAPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000	PAPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	823.750.000	PAPBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.669.542.618	PAPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.136.950.000	PAPBD
	Pengadaan Mebel	276.040.000	PAPBD
	Pengadaan Peralatan atau Mesin Lainnya	256.552.618	PAPBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.604.880.040	PAPBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.000.040	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.204.880.000	PAPBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.797.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.800.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.800.000	PAPBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.197.000	PAPBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	PAPBD
JUMLAH		5.878.678.953	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


BINTI CHOIRUL MUAMANAH, SE., M.SI
Penata
NIP 19890107 201001 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MISPRANOTO, S.M.**
Jabatan : **ANALIS PENDAPATAN DAERAH / KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


MISPRANOTO, S.M.
Penata Muda
NIP 19880121 201001 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100
	Tersedianya dana gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	42
	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
	Tersusunnya dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12
2	Tercapainya penyelenggaraan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	12
	Tersedianya dana dalam penyaluran bantuan keuangan ke desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12
	Terselenggaranya pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12
	Tersedianya dana bagi hasil yang akan diberikan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.154.462.378	PAPBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.009.462.378	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	75.000.000	PAPBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	PAPBD
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	210.190.260.415	PAPBD
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	98.000.000	PAPBD
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	201.444.602.800	PAPBD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	200.000.000	PAPBD
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.447.657.615	PAPBD
	JUMLAH	216.344.722.793	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


SAIPUDIN SEFFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


MISPRANOTO, SM.
Penata Muda
NIP 19880121 201001 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR. S, S.Pi**
Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN /
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR, S.Pi
Penata Muda Tk. I
NIP 19911221 201403 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Persen	100
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3
	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3
	Tersusunnya laporan terkait capaian dan realisasi kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3

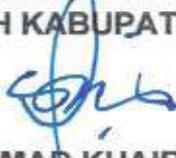
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.252.280	PAPBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	55.551.240	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.950.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.750.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	52.001.040	PAPBD
JUMLAH		160.252.280	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Pembina
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR, S.Pi
Penata Muda Tk. I
NIP 19911221 201403 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAINUL ARIF, SEI, MM**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIJALI, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

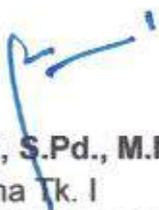
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATÈN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19790604 200604 1 016


ZAINUL ARIF, SEI, MM
Pembina
NIP 19851230 201001 1 028

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

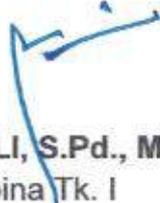
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Persen	92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.242.087.000	PAPBD
JUMLAH		1.242.087.000	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19790604 200604 1 016


ZAINUL ARIF, SEI, MM
Pembina
NIP 19851230 201001 1 028



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURYANTI, S.E., MM.**
Jabatan : **KASUBBID PENGELOLAAN BELANJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAINUL ARIF, S.EI., MM.**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KASUBBID PENGELOLAAN BELANJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, S.EI., MM
Pembina
NIP 19851230 201001 1 028

NURYANTI, S.E., MM.
Penata
NIP 19820227 201101 2 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN BELANJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan realisasi belanja daerah	Persen	92
	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	24
	Terselenggaranya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	458

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	453.020.000	PAPBD
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	273.370.000	PAPBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	179.650.000	PAPBD
JUMLAH		453.020.000	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KASUBBID PENGELOLAAN BELANJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI., MM
Pembina
NIP 19851230 201001 1 028



NURYANTI, S.E., MM.
Penata
NIP 19820227 201101 2 008



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI AHMAD FAUJI, S.E.**
Jabatan : **KASUBBID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAINUL ARIF, SEI., MM**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, SEI., MM
Pembina
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KASUBBID PERBENDAHARAAN
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

DEDI AHMAD FAUJI, S.E.
Penata
NIP 19841110 201001 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan realisasi belanja daerah	Persen	95
	Tersusunnya dokumen koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	6000
	Tersusunnya dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Laporan	100
	Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	21

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	383.527.000	PAPBD
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	240.597.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	74.800.000	PAPBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	68.130.000	PAPBD
JUMLAH		383.527.000	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua

**KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI., MM

Pembina

NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama

**KASUBBID PERBENDAHARAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



DEDI AHMAD FAUJI, S.E.

Penata

NIP 19841110 201001 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
PENGELOLAAN KAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVI RAFDA ARYANI, SE, M.M**
Jabatan : **ANALIS PENDAPATAN DAERAH /
KETUA TIM SUBSTANSI PENGELOLAAN KAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAINUL ARIF, SEI., MM**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, SEI., MM
Pembina
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI
PENGELOLAAN KAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

EVI RAFDA ARYANI, SE, M.M
Penata Tk. I
NIP 19770929 201001 2 014

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI PENGELOLAAN KAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan realisasi belanja daerah	Persen	95
	Tersusunnya dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Dokumen	20
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Dokumen	150
	Tersusunnya dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	65
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempata utang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempata utang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	40

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	405.540.000	PAPBD
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	80.000.000	PAPBD
	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	118.040.000	PAPBD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	157.500.000	PAPBD
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	50.000.000	PAPBD
	JUMLAH	405.540.000	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI., MM
Pembina
NIP. 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI
PENGELOLAAN KAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



EVI RAFDA ARYANI, SE, M.M
Penata Tk. I
NIP. 19770929 201001 2 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPPY NEW YEAR BONITA, SE, MM.**

Jabatan : **KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIJALI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

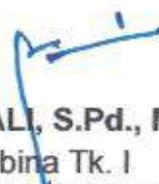
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19790604 200604 1 016

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE, MM.
Pembina
NIP 19840101 200804 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

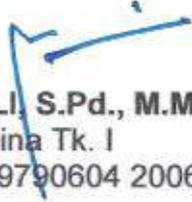
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.135.806.904	PAPBD
JUMLAH		1.135.806.904	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19790604 200604 1 016

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE, MM.
Pembina
NIP 19840101 200804 2 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WILLY GITA ARJUNA, A.Md**
Jabatan : **KASUBBID AKUNTANSI**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAPPY NEW YEAR BONITA BONITA, SE., MM.**
Jabatan : **KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

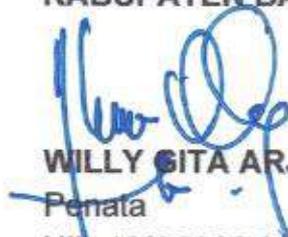
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KASUBBID AKUNTANSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
Pembina
NIP 19840101 200804 2 002


WILLY GITA ARJUNA, A.Md
Penata
NIP 19870620 201001 1 014

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100
	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	2
	Tersusunnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18
	Tersusunnya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1

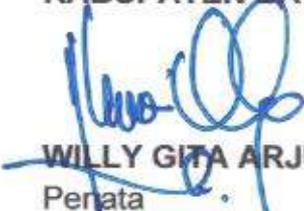
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	592.907.544	PAPBD
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	121.000.000	PAPBD
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	146.413.800	PAPBD
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	255.831.600	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	69.662.144	PAPBD
	JUMLAH	592.907.544	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KASUBBID AKUNTANSI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA**

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
 Pembina
 NIP 19840101 200804 2 002


WILLY GITA ARJUNA, A.Md
 Perjata
 NIP 19870620 201001 1 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHARMAWAN PUTRA, S.E.**
Jabatan : **KASUBBID PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.**
Jabatan : **KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KASUBBID PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU
BARA**

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
Pembina
NIP 19840101 200804 2 002

DHARMAWAN PUTRA, S.E
Penata
NIP 19860424 201101 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100
	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	42
	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2
	Tersusunnya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	116

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	542.899.360	PAPBD
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	120.000.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	168.800.000	PAPBD
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	177.012.000	PAPBD
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	77.087.360	PAPBD
	JUMLAH	542.899.360	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
 BADAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama
**KASUBBID PELAPORAN
 BADAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA**

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
 Pembina
 NIP 19840101 200804 2 002

DHARMAWAN PUTRA, S.E
 Penata
 NIP 19860424 201101 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.STPi., M.M.**
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIJALI, S.Pd., M.M**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

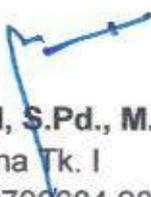
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19790604 200604 1 016

Pihak Pertama
**KABID ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.STPi., M.M.
Penata
NIP 19880704 201403 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.435.620.000	PAPBD
JUMLAH		1.435.620.000	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19790604 200604 1 016

Pihak Pertama
**KABID ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.STPi., M.M.
Penata
NIP 19880704 201403 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T**

Jabatan : **KASUBBID ANGGARAN I**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., MM.**

Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., MM.

Penata

NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama
**KASUBBID ANGGARAN I
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T

Penata

NIP 19860530 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persen	100
	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41
	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41
	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41
	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	632.680.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	94.030.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	94.030.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	131.210.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	154.910.000	PAPBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	53.500.000	PAPBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	105.000.000	PAPBD
	JUMLAH	632.680.000	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
KABID ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., MM.
 Penata
 NIP 19880794 201403 1 002

Pihak Pertama
KASUBBID ANGGARAN I
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T
 Penata
 NIP 19860530 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDARLIANI**
Jabatan : **KASUBBID ANGGARAN II**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., MM.**
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.STPi., MM
Penata
NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama
**KASUBBID ANGGARAN II
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


IDARLIANI
Penata Tk. I
NIP 19720404 199402 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persen	100
	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	2
	Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6
	Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	5
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	802.940.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	80.300.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80.430.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	312.730.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	304.480.000	PAPBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	25.000.000	PAPBD
JUMLAH		802.940.000	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
KABID ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.STPi., MM
 Penata
 NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama
KASUBBID ANGGARAN II
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



IDARLIANI
 Penata Tk. I
 NIP 19720404 199402 2 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**

Jabatan : **KABID ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIJALI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

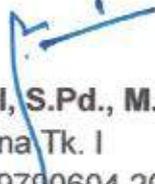
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19790604 200604 1 016


NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

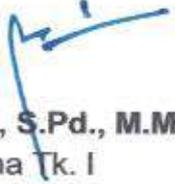
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.587.780.000	PAPBD
JUMLAH		1.587.780.000	

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**


RIJALI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19790604 200604 1 016


NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YESSI AMELIA AGUSTINA SIREGAR, S.E, M.M**
Jabatan : **KASUBBID PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KASUBBID PENGAMANAN
DAN PENGHAPUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

YESSI AMELIA AGUSTINA S, S.E, M.M
Penata
NIP. 19860807 201101 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Laporan Inventaris Aset Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	92
	Tersusunnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1
	Tersusunnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	30

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	769.307.500	PAPBD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	468.950.000	PAPBD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	300.357.500	PAPBD
	JUMLAH	769.307.500	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KASUBBID PENGAMANAN
DAN PENGHAPUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



YESSI AMELIA AGUSTINA S, S.E, M.M
Penata
NIP. 19860807 201101 2 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOPIE ASRIANSYAH, SE**
Jabatan : **KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

YOPIE ASRIANSYAH, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19840805 201406 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	92
	Terusunnya dokumen penyusunan standar harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Laporan	1
	Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1
	Terusunnya dokumen laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	270.872.500	PAPBD
	Penyusunan Standar Harga	41.080.000	PAPBD
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	4.945.000	PAPBD
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	224.847.500	PAPBD
	JUMLAH	270.872.500	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



YOPIE ASRIANSYAH, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19840805 201406 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUZI ANDAYU, A.Md**
Jabatan : **PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
/ KASUBBID PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KETUA TIM PEMANFAATAN
POTENSI ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

FAUZI ANDAYU, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP. 19871116 201001 1008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	92
	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	547.600.000	PAPBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	547.600.000	PAPBD
	JUMLAH	547.600.000	PAPBD

Air Putih, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
**KABID ASET
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KETUA TIM PEMANFAATAN POTENSI
ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



FAUZI ANDAYU, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP. 19871116 201001 1008